

# Analisis Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Dengan Mekanisme Pembayaran Langsung = Analysis of Domestic Office Travel Accountability Documents Verification in the Ministry of Coordinator of Economic Affairs Republic of Indonesia with Direct Payment Mechanism

Hesti Cahya Yustika, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20468354&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Laporan magang ini membahas tentang bagaimana proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri di kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia dengan mekanisme pembayaran langsung. Penulis menemukan bahwa mayoritas kesalahan penyajian dokumen pertanggungjawaban terletak pada kesalahan pembebanan akun perjalanan dinas. Selain itu, proses verifikasi yang dijalankan memiliki perbedaan dengan SOP-18/SET.M.EKON.3.3.2/2008, dimana pada praktiknya tidak terdapat penyaji data namun terdapat admin routing slip. Penulis juga menemukan bahwa dalam praktiknya, surat perintah membayar dapat dicetak oleh verifikator, hal ini dapat berdampak pada tingginya resiko kecurangan yang mungkin terjadi. Penulis menyarankan agar bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pemisahan tugas untuk verifikator dan pencetak surat perintah membayar, dengan cara menambah jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan, agar kedepannya proses verifikasi dapat berjalan dengan semakin efisien dan efektif.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This internship report discusses the verification process of the accountability documents for domestic office travel with direct payment mechanism in the Ministry of Coordinator of Economic Affairs. The author found out, most of the accountability document errors are related to wrong office travel account. Beside that, there are several differences between the implementation of verification process and SOP 18 SET.M.EKON.3.3.2 2008, practically there is no data renderer but there is a routing slip admin. The author also found that the verifikator have the authorization to print the payment statement letter, this could result in higher risk of fraud that might happen. The author suggest that the finance team of the Ministry of Coordinator of Economic Affairs should segregate the duties for verifikator and the payment statement letter officer, by adding the number of personnels, so the verification process could be more efficient and effective in the future.